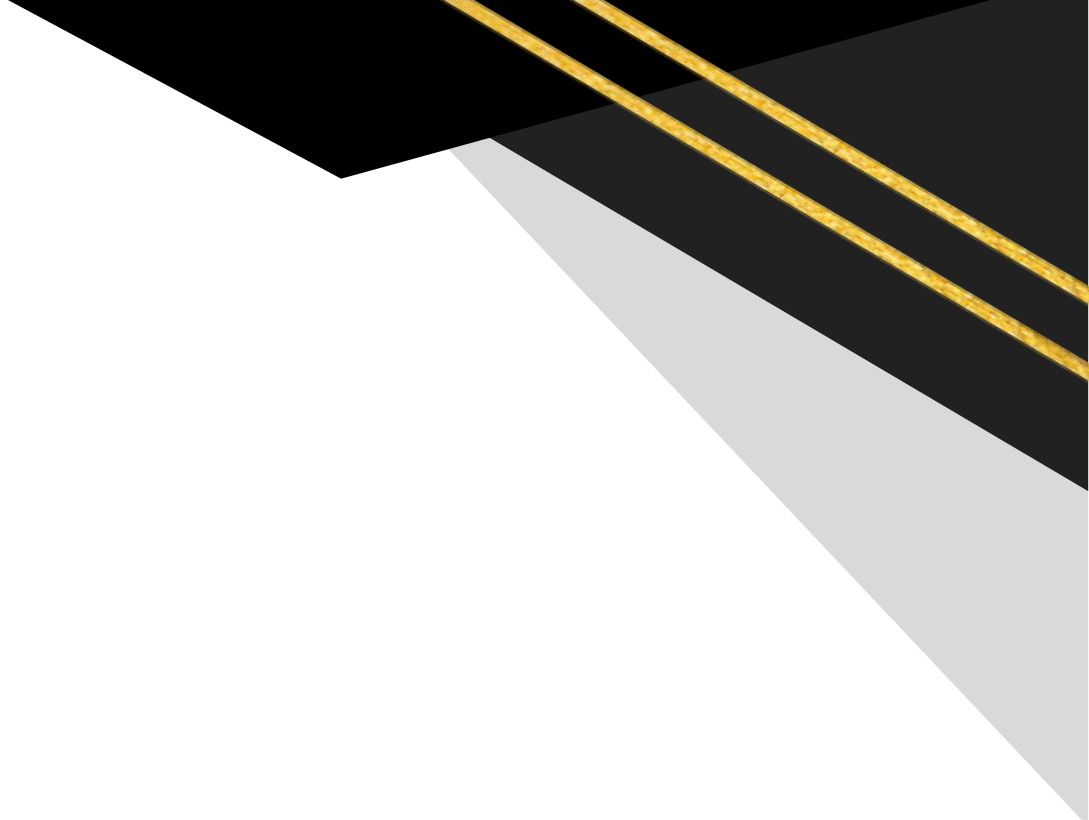




RENCANA KERJA TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN GROBOGAN

KATA PENGANTAR

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan merupakan rencana tahunan yang disusun sebagai arahan bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk masa satu tahun 2026 dengan berpedoman pada RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 beserta perubahannya. Penyusunan Rencana kerja Sekretariat DPRD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Disadari bahwa Rencana kerja 2026 ini masih jauh dari sempurna maka diharapkan saran dan masukan semua pihak khususnya dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan guna lebih meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi tugas kedewanan Anggota DPRD yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Oleh karena itu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana kerja 2026 ini kami ucapkan banyak terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. DARU WISAKTI, M.Si

NIP. 19690511 199001 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dan perubahannya. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan fokus melakukan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Ladasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah dokumen Perencanaan Kerja untuk 1 tahun yang mengacu pada Renstra Sekretariat Dewan tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Grobogan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

1.3.2 Tujuan Penyusunan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana kegiatan;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam perencanaan dan program kegiatan selama 1 tahun;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat mengambil langkah - langkah atau kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing – masing;
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 yaitu :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Setwan tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Setwan
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Setwan
- 2.4 Review terhadap rancangan RKPD

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD
- 3.3 Program dan kegiatan Tahun Anggaran

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Setwan tahun lalu

Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dan perubahannya. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 mengacu pada hasil capaian kinerja dan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan tahun 2025.

Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 89.681.870.095,00 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 2.919.940.000,00. Total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebesar Rp. 92.601.810.095,00 yang terdiri dari 2 Program, 15 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan. Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 92.889.101.400,00 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 92.889.101.400,00. Total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar Rp. 96.777.756.500,00 yang terdiri dari 2 Program, 15 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan.

Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 82.331.542.833,- atau sebesar 85, 07%. Realisasi pada tahun 2024 belum dapat mencapai target. Dari hasil evaluasi, pada Tahun Anggaran 2024 terdapat terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih sangat rendah, atau dibawah 50 % (lima puluh persen), sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang secara keseluruhan hanya mencapai realisasi 5,2%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum realisasi 4 %, sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur realisasi 0%, sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat realisasi 8%, sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian realisasi 0%.

Kecilnya realisasi dikarenakan tidak ada alokasi waktu pelaksanaan di agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan oleh Keputusan Badan Musyawarah. Alokasi waktu setiap bulannya, banyak tersita untuk pembahasan raperda, rapat koordinasi dan kegiatan study referensi.

2. Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD, yang saat perencanaan dialokasikan untuk 6 (enam) kali pendalaman tugas, hanya dapat terealisasi 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan pada bulan februari, agustus, September, pendalaman tugas tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemilihan umum Legislatif, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dan pelantikan Pimpinan DPRD. Situasi politik nasional juga menyebabkan tertundanya pelantikan Pimpinan DPRD sehingga kegiatan DPRD juga tertunda.
3. Pada sub kegiatan pelaksanaan medical check up DPRD, hanya 27 anggota yang menggunakan haknya, karena yang lainnya sudah melaksanakan medical check up secara mandiri.
4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD, untuk efisiensi waktu rapat pada pembahasan pertanggungjawaban APBD dan pembahasan APBD Perubahan TA. 2024, pelaksanaan rapat kerjanya dilaksanakan di dalam kota, sehingga alokasi anggaran yang direncanakan untuk rapat luar daerah sebanyak 3 kali hanya terlaksana 1 kali untuk pembahasan APBD TA. 2025.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Sekretariat DPRD hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2024 Sekretariat DPRD

Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
							Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA penetapan dan Perubahan tersusun	Doku men	2	Dokum en	2	2	2	100,00	2	2	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP dan LPPD tersusun	Lapor an	2	Lapora n	2	2	2	100,00	2	2	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100,00

		keuangan tepat waktu										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Anggota DPRD tepat waktu	Orang/bulan	32	Orang/bulan	14	32	32	100,00	36	36	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	dokumen	0	dokumen	1	0	0	100,00	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Laporan	1	1	1	100,00	1	1	100,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	Paket	136	281	281	100,00	179	179	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	144	Orang	99	162	140	90	128	128	100,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	%	100	100	88	98,00	90	90	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	Paket	1245	1108	942	85	1	1	100

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	Paket	28	56	56	100,00	2	2	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	1	paket	80048	25426	22630	90	1	1	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	1	paket	5606	5606	5326	95	1	1	100
	Penyediaan paket Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	paket	1	paket	1607	2775	2498	90	1	1	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultais SKPD	Laporan	600	Laporan	12	825	743	96	641	641	100
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang diadakan	paket	48	paket	106	178	178	100,00	56	56	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	7	Unit	0	22	22	100,00	11	11	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	55	Unit	36	52	52	100,00	69	69	100
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	%	100	100	90	81,5	100	100	100
	Penyediaan Jasa	Jumlah laporan	laporan	12	laporan	3000	12	12	100,00	12	12	100

	Surat Menyurat	penyediaan jasa Surat Menyurat										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	laporan	12	12	12	100,00	12	12	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	2	Laporan	3195	2	2	100,00	2	2	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	laporan	969	12	12	100,00	12	12	100
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	%	100	100	99	100,00	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5	Unit	5	5	5	100,00	5	5	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah iendaraan dinas operasioanl atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Unit	29	Unit	25	25	29	100,00	29	29	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	4	Unit	4	4	4	100,00	4	4	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ter	Unit	245	Unit	239	245	245	90	245	245	100

		pelihara										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara	Unit	2	Unit	2	1	2	100,00	1	1	100
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	%	100	%	100	100	98	70,00	100	100	100
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Orang / bulan	50	Orang / bulan		50	50	100,00	50	50	100
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	paket	50	paket	300	250	3	100,00	250	250	100
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	Orang	50	50	50	55	50	50	100
9.	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	%	100	%	100	100	91	97,00	100	100	100
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	120	Laporan	305	350	120	95	350	350	100
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paketKebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Paket	4	Paket	5069	48	4	100	48	48	100
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	%	90	%	100	100	100	100,00	100	100	100
	Pembahasan	Jumlah	dokume	2	Doku	2	2	2	100,00	2	2	100

	Rancangan Peraturan Daerah	dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	n		men							
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian per UU an	dokumen	2	dokumen	1	1	1	100,00	1	1	100
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang tersusun	dokumen	1	dokumen	0	0	0	0	1	1	100
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2	Dokumen	2	2	2	100,00	2	2	100
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	2	Dokumen	3	3	3	100,00	3	3	100
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	%	100	%	100	100	5	5	0	0	100
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	laporan	84	laporan	60	48	4	3	0	0	100
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	laporan	84	laporan	60	48	0	0	0	0	100
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laporan	84	laporan	60	48	0	0	0	0	100
	Pengawasan Urusan	Pengawasan	laporan	84	laporan	60	48	8	8	0	0	100

	Pemerintahan Bidang Perekonomian	Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian										
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	%	100	%	100	100	70	100,00	100	100	100
	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	dokumen	0	dokumen	0	1	1	100,00	0	0	100
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	dokumen	6	dokumen	6	6	3	50	6	6	100
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	175	dokumen	12	175	172	98	175	175	100
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang terpenuhi	Orang	7	Orang	7	7	7	100,00	7	7	100
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	dokumen	6	dokumen	1900	6	6	100,00	6	6	100
4.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100
	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan reses	dokumen	2	dokumen	3	2	2	100,00	3	3	100
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD											
	Penyusunan Kode Etik	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen	1	dokumen					1	1	100
5	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	%	100	%	100	100	88	85	100	100	100

	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD yang telah tersusun	laporan	12	laporan	550	12	12	100,00	12	12	100
	Fasiilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	jumlah dokumen hasil Fasiilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	dokumen	12dokumen						12	12	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setwan

Capaian kinerja Pelayanan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dapat dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2024-2025
Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja	Satuan	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi	Catatan analisis
				2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	
Presentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	%			100	100	100	100	100	100	100	
Presentase Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	%			95	100	100	100	100	100	100	
Presentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			90	100	100	100	88	95	100	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			90	100	100	100	91	95	100	
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%			93	100	100	100	91,5	95	100	
Persentase	%			90	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi	Catatan analisis
				2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	
Penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP											
Prosentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	%			100	100	100	100	92	95	100	
Presentase Implementasi Tugas dan Kewajiban yang Terselesaikan Sesuai SOP	%			100	100	100	100	78	90	100	
Presentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	%			100	90	100	100	93	100	100	
Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	
Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	%			100	100	100	100	5	75	80	
Presentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	%			100	100	100	100	70	90	100	
Presentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dianggarkan	%			100	100	100	100	100	100	100	
Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	%			100	100	100	100	90	95	100	
Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai			77	78	79	80	81	82	85	

Dari capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Sekretariat DPRD tahun 2024.

Terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya sangat kecil sehingga mengakibatkan rendahnya capaian realisasi Sekretariat DPRD, beberapa sub kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang secara keseluruhan hanya mencapai

realisasi 5,2%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum realisasi 4 %, sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur realisasi 0%, sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat realisasi 8%, sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian realisasi 0%. Kecilnya realisasi dikarenakan tidak ada alokasi waktu pelaksanaan di agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan oleh Keputusan Badan Musyawarah. Alokasi waktu setiap bulannya, banyak tersita untuk pembahasan raperda, rapat koordinasi dan kegiatan study referensi.

2. Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD, yang saat perencanaan dialokasikan untuk 6 (enam) kali pendalaman tugas, hanya dapat terealisasi 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan pada bulan februari, agustus, September, pendalaman tugas tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemilihan umum Legislatif, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dan pelantikan Pimpinan DPRD. Situasi politik nasional juga menyebabkan tertundanya pelantikan Pimpinan DPRD sehingga kegiatan DPRD juga tertunda.
3. Pada sub kegiatan pelaksanaan medical check up DPRD, hanya 27 anggota yang menggunakan haknya, karena yang lainnya sudah melaksanakan medical check up secara mandiri.
4. Beberapa sub kegiatan bersifat penyediaan, sehingga realisasi tidak tepat sebagaimana target yang direncanakan karena belanja menyesuaikan dengan volume kebutuhan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Setwan

Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan fungsi, antara lain :

1. Penyusunan Program Sekretariat DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan. Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi,

profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya tuntutan untuk mencapai Good Governance dari DPRD sehingga menuntut semakin baiknya layanan yang harus diberikan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
2. Perubahan kondisi dan situasi politik yang terjadi sehingga akan mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD.
3. Tuntutan untuk meningkatkan Profesionalisme SDM pada Sekretariat DPRD
4. Peningkatan pemahaman terhadap teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan yang professional.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD. Beberapa isu-isu penting atau permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Semakin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dukungan layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, terutama yang terjadi pada pertengahan

pelaksanaan dokumen anggaran, sehingga mengakibatkan tidak sesuai dengan perencanaan;

3. Penyerapan anggaran yang belum sesuai dengan perencanaan sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan terhadap anggota DPRD;
4. Sebagai fasilitasi pendukung kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD dalam pencapaian target dan kinerja dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang berkembang.
5. Analisis beban kerja belum berjalan secara optimal sehingga masih ada Bagian yang belum berimbang jumlah personil dengan beban kerja;
6. Masih kurangnya pemahaman pegawai Sekretariat DPRD atas pengelolaan dan pengendalian resiko dalam pelaksanaan tugas.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rancangan RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif

Rancangan RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan, hasil review terhadap Rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Grobogan

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100	10.803.340.400	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100	10.803.340.400	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	100	342.844.000	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	100	342.844.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan Raperda	2	200.689.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan Raperda	2	200.689.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	142.155.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	142.155.000	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu	100	99.120.000	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu	100	99.120.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	55.990.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	55.990.000	
	Pembahasan APBD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	3	43.130.000	Pembahasan APBD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	3	43.130.000	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan	100	5.284.150.400	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat	100	5.284.150.400	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			tugas					kapasitas dalam menjalankan tugas			
	Pendalaman Tugas DPRD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	2.642.200.000	Pendalaman Tugas DPRD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	2.642.200.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Setwan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	175	2.153.880.400	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Setwan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	175	2.153.880.400	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	211.400.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	211.400.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	6	276.670.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	6	276.670.000	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	100	4.895.226.000	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	100	4.895.226.000	
	Pelaksanaan Reses	Setwan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	3	4.895.226.000	Pelaksanaan Reses	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	3	4.895.226.000	
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	90	183.000.000	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	90	183.000.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Setwan	Jumlah laporan Alat	12	140.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Setwan	Jumlah laporan Fraksi,	12	140.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			Kelengkapan dan kinerja DPRD yang telah tersusun					Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD yang telah tersusun			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Setwan	Jumlah Dokumne Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	28.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Setwan	Jumlah Dokumne Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	28.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Setwan	Jumlah Dokumne Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	12	15.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Setwan	Jumlah Dokumne Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	12	15.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETWAN	Laporan Keuangan sesuai Sap	100	83.143.578.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETWAN	Laporan Keuangan sesuai Sap	100	83.143.578.900	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	100				Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	100		
			Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	2				Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	2		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	74.450.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	74.450.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	59.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	59.450.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	4.717.636.500	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	4.717.636.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setwan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36	4.655.688.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setwan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36	4.655.688.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Setwan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan	1	61.948.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Setwan	Jumlah Laporan Keuangan	1	61.948.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	SKPD		hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			SKPD		Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	1.109.893.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	1.109.893.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	191.725.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	191.725.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144	918.168.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144	918.168.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	33.559.661.900	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	33.559.661.900	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setwan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	76.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setwan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	76.200.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	133.766.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	133.766.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setwan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1.307.790.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setwan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1.307.790.000	
	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Setwan	Jumlah paket Barang Cetakan yang disediakan	1	124.570.000	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Setwan	Jumlah paket Barang Cetakan yang disediakan	1	124.570.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Setwan	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	1	198.515.900	Penyediaan Bahan/Material	Setwan	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	1	198.515.900	
	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Setwan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	31.718.820.000	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Setwan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	31.718.820.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	1.455.924.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	1.455.924.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Mebel	Setwan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	48	775.948.000	Pengadaan Mebel	Setwan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	48	775.948.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setwan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7	81.393.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setwan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7	81.393.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	55	598.593.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	55	598.593.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.874.490.100	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.874.490.100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	12	60.890.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	12	60.890.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	968.969.100	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Setwan	Jumlah persediaan listrik, Air, Internet dan telepon Dalam satu Tahun	12	968.969.100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	24.284.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2	24.284.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	820.347.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	820.347.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	3.384.213.100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	3.384.213.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	337.394.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	337.394.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setwan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29	1.684.303.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setwan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29	1.684.303.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	798.118.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/dire	4	798.118.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								habilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	245	280.748.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	245	280.748.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jmlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	2	283.650.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jmlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	2	283.650.000	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	100	35.107.187.300	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	100	35.107.187.300	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Setwan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50	34.333.457.300	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Setwan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50	34.333.457.300	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	50	683.730.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	50	683.730.000	
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	50	90.000.000	Pelaksanaan orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	50	90.000.000	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	100	1.860.123.000	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	100	1.860.123.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Setwan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	120	360.123.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Setwan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	120	360.123.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Setwan	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	4	1.500.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Setwan	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	4	1.500.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan kecamatan se-Kabupaten Grobogan dan dari berbagai usulan dari LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari masyarakat dan pelaksanaan forum lintas Perangkat Daerah tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume indicator kinerja	Catatan
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional pada Tahun 2026 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, menetapkan bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:

- a. pendapatan per kapita setara negara maju;
- b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJM Nasional, yang selanjutnya merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah, Renstra-Kl, dan RKP. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, bahwa RPJMN merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang tercantum di dalam RPJM Nasional.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Isu strategis Jawa Tengah yang utama adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah jika dibandingkan tingkat nasional dan provinsi lain, terutama di Jawa dan Bali. Isu kesejahteraan masyarakat tersebut terkait dengan isu perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Dengan memperhatikan gambaran isu tersebut, dalam RPD Tahun 2024-2026 dirumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Selanjutnya, berdasarkan isu strategis tersebut dan tetap memperhatikan berbagai kebijakan nasional dan amanat regulasi, dengan menggunakan instrumen pohon kinerja dan cascading maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah

diarahkan pada "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari". Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2026 adalah Perwujudan Masyarakat Kabupaten Grobogan yang berdaya saing dan lebih sejahtera. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ini meliputi:

- 1) Pemantapan Infrastruktur daerah
- 2) Pemantapan pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk pengembangan perekonomian
- 3) Pemantapan pelayanan publik yang prima
- 4) Pemantapan mutu layanan kesehatan
- 5) Pemantapan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
- 6) Pemantapan responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Pemantapan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a) Tujuan

Adapun tujuan pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD.

b) Sasaran Rencana kerja

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
2. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Adapun target kinerja tujuan dan sasaran tahun berjalan 2025 dan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Tahun 2026 Sekretariat DPRD
Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2026
1	Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil survei indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai	82,19	82,25
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	Nilai SAKIP adalah hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	Nilai		BB (70)

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2026

Sekretariat DPRD dalam anggaran 2026 memiliki 2 (dua) program yaitu:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program tersebut diatas dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut ini :

No	Uraian Program/Kegiatan	Target Kinerja (%)	Pagu Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	77.761.060.800
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.777.345.700
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.310.695.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	30.497.927.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.151.158.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.237.743.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.850.806.400
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	35.169.955.300
	Layanan Administrasi DPRD	100	1.755.429.500
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		10.187.501.200
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	206.610.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	47.770.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	4.710.075.000
	Penyerapan dan Penghimpunan	100	5.111.336.400

No	Uraian Program/Kegiatan	Target Kinerja (%)	Pagu Anggaran
	Aspirasi Masyarakat		
	Fasilitasi Tugas DPRD	100	123.510.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN			87.948.562.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program, kegiatan serta sub kegiatan untuk rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2026 ini mengacu yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan (renstra) Sekretariat DPRD periode tahun 2021-2026 dan perubahan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan disusun sebagai upaya pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana telah tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Nomenklatur yang digunakan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2026 memiliki 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan.

Rincian tentang program , Kegiatan dan Sub Kegiatan tercantum dalam lampiran dibawah ini.

RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sekretariat DPRD									
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP		100	10.804.340.400			100	10.804.340.400
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan		100	206.610.000			100	342.844.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembahasan Raperda	Kec. Purwoda di	2	158.840.000	Dana transfer Umum- DAU		2	200.689.000
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Dokumen	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	Kec. Purwoda di	1	47.770.000	Dana transfer Umum- DAU		1	142.155.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu		100	35.969.800	Dana transfer Umum- DAU		100	99.120.000
Pembahasan KUA PPAS	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Kec. Purwoda di	2	20.959.800	Dana transfer Umum- DAU		2	55.990.000
Pembahasan APBD	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Kec. Purwoda di	3	15.010.000	Dana transfer Umum- DAU		3	43.130.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	%	Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas		100	4.710.075.000	Dana transfer Umum- DAU		100	5.284.150.400
Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Kec. Purwoda di	6	2.730.200.000	Dana transfer Umum- DAU		6	2.642.200.000
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	Kec. Purwoda di	175	1.568.919.000	Dana transfer Umum- DAU		175	2.153.880.400
Penyediaan Tenaga Ahli	Orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kec.	7	211.400.000	Dana transfer		7	211.400.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Fraksi			Purwoda di			Umum- DAU			
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	Kec. Purwoda di	6	199.556.000	Dana transfer Umum- DAU		6	276.670.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan		100	5.111.336.400	Dana transfer Umum- DAU		100	4.895.226.000
Pelaksanaan Reses	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	Kec. Purwoda di	3	5.111.336.400	Dana transfer Umum- DAU		3	4.895.226.000
Fasilitasi Tugas DPRD	%	Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu		90	123.510.000	Dana transfer Umum- DAU		90	183.000.000
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Laporan	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD yang telah tersusun	Kec. Purwoda di	12	101.110.000	Dana transfer Umum- DAU		12	140.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kec. Purwoda di	12	22.400.000	Dana transfer Umum- DAU		12	28.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Oiminan DPRD	Kec. Purwoda di	12	0			12	15.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	Laporan Keuangan sesuai Sap		100	77.761.060.800	Dana transfer Umum- DAU		100	83.143.578.900
	%	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah		100		Dana transfer Umum- DAU		100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		100	10.000.000	Dana transfer Umum- DAU		100	74.450.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil	Kec. Purwoda	2	0	Dana transfer Umum- DAU		2	15.000.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	di						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Purwoda di	2	10.000.000	Dana transfer Umum- DAU		2	59.450.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		100	4.777.345.700	Dana transfer Umum- DAU		100	4.717.636.500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Purwoda di	36	4.585.913.000	Dana transfer Umum- DAU		36	4.655.688.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Purwoda di	1	191.432.700	Dana transfer Umum- DAU		1	59.450.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu		100	1.310.695.000	Dana transfer Umum- DAU		100	1.310.695.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Purwoda di	1	191.725.000	Dana transfer Umum- DAU		1	191.725.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Purwoda di	12	1.112.880.000	Dana transfer Umum- DAU			1.112.880.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Purwoda di	9	57.260.000	Dana transfer Umum- DAU		144	57.260.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	30.497.927.800	Dana transfer Umum- DAU		100	33.358.859.900

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Purwoda di	1	52.960.000	Dana transfer Umum- DAU		1	76.200.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Purwoda di	1	107.012.000	Dana transfer Umum- DAU		1	133.766.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Purwoda di	1	1.035.343.000	Dana transfer Umum- DAU		1	1.106.988.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	Jumlah paket Barang Cetak yang disediakan	Kec. Purwoda di	1	113.674.800	Dana transfer Umum- DAU		1	124.750.000
Penyediaan Bahan/Material	paket	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	Kec. Purwoda di	1	158.813.000	Dana transfer Umum- DAU		1	198.515.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Purwoda di	600	29.030.125.000	Dana transfer Umum- DAU		600	31.718.820.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		100	1.151.158.000	Dana transfer Umum- DAU		100	1.455.924.000
Pengadaan Mebel	paket	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Kec. Purwoda di	48	441.948.000	Dana transfer Umum- DAU		48	775.948.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kec. Purwoda di	7	65.105.000	Dana transfer Umum- DAU		7	81.383.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Purwoda di	55	644.105.000	Dana transfer Umum- DAU		55	598.593.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	%	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang		100	1.237.743.100	Dana transfer Umum- DAU		100	1.874.490.100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec. Purwoda di	12	36.000.000	Dana transfer Umum- DAU		12	60.890.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Purwoda di	12	968.969.100	Dana transfer Umum- DAU		12	968.969.100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Purwoda di	2	19.427.000	Dana transfer Umum- DAU		2	24.284.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Purwoda di	12	213.347.000	Dana transfer Umum- DAU		12	820.347.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100	1.850.806.400	Dana transfer Umum- DAU		100	3.384.213.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Purwoda di	5	215.050.000	Dana transfer Umum- DAU		5	337.394.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Purwoda di	29	633.730.000	Dana transfer Umum- DAU		29	1.684.303.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Purwoda di	4	598.118.000	Dana transfer Umum- DAU		4	798.118.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi	unit	Jumlah Sarana dan	Kec.	245	176.988.400	Dana transfer		245	280.748.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Purwoda di			Umum- DAU			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	Jmlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Purwoda di	2	226.920.000	Dana transfer Umum- DAU		2	283.650.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP		100	35.169.955.300	Dana transfer Umum- DAU		100	35.107.187.300
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Orang/ bul an	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Kec. Purwoda di	50	34.382.645.300	Dana transfer Umum- DAU		50	34.333.457.300
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	paket	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kec. Purwoda di	50	697.310.000	Dana transfer Umum- DAU		50	683.730.000
Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Orang	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Kec. Purwoda di	50	90.000.000	Dana transfer Umum- DAU		50	90.000.000
Layanan Administrasi DPRD	%	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP		100	1.755.429.500	Dana transfer Umum- DAU		100	1.860.123.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kec. Purwoda di	120	255.429.500	Dana transfer Umum- DAU		120	360.123.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	paket	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Kec. Purwoda di	4	1.500.000.000	Dana transfer Umum- DAU		4	1.500.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah Program Tahunan Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2026. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan, sebagai salah satu sarana tata Kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;

- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun ;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.3 Rencana tindak Lanjut

Dengan ditetapkananya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Grobogan Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Purwodadi, 15 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. DARU WISAKTI, M.Si

NIP. 19690511 199001 1 001